



Ganaya:

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

ISSN : 2615-0913 (Media Online) <http://ejournal.jayapanguspress.org/index.php/ganaya>

---

## Kebudayaan Bali Dan Agama Hindu

Oleh

I Ketut Wartayasa

Kementerian Agama Kota Denpasar

[wartayasa@gmail.com](mailto:wartayasa@gmail.com)

---

### **Abstract**

*Bali has its own distinctive cultural diversity in which Hindu religion is its soul. The religion, customs and culture of Bali is an inseparable unity. The growing Hindu religion in Bali harmonizes with a local religion rich in customs and culture. The Hindu presence in Bali embraces the local religion. The arrival of Hinduism in Bali from both India and Java is accepted selectively and adaptively in the presence of religion and local communities. Balinese Hinduism already has an identity, a character different from India but essentially the same. In culture, Hinduism flourishes because it provides a religiously humanist space so that Hindu religion is flexible and universal.*

Diterima : 11 Agustus 2018  
Direvisi : 15 September 2018  
Diterbitkan : 28 September 2018

Kata Kunci :  
Kebudayaan Bali, Agama Hindu

### **Abstrak**

Bali mempunyai kekhasan dengan ragam budaya yang dimiliki dimana agama Hindu sebagai jiwanya. Agama, adat dan budaya Bali sebuah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Agama Hindu yang berkembang di Bali harmoni dengan agama lokal yang kaya akan adat dan budaya. Kehadiran Hindu di Bali mempermulia agama lokal. Kedatangan Hindu di Bali baik darai India dan Jawa di terima secara selektif dan adaptif dengan keberadaan agama dan masyarakat lokal. Agama Hindu Bali sudah mempunyai identitas, karakter yang berbeda dengan India namun esensinya sama. Dalam budaya, agama Hindu tumbuh subur karena memberikan ruang yang humanis relegius sehingga agama Hindu bersifat fleksibel dan universal.

### **Pendahuluan**

Pada tahun 1930 seorang penulis asing bernama Hickman Powel memberi sebutan *The Paradise Island* kepada sebuah pulau yang memiliki luas wilayah hanya 5.632,86 km<sup>2</sup> atau 563.286,40 Ha. Sementara itu, Nehru menyebut pulau itu sebagai *the morning*

*of the world*. Pulau yang dimaksud oleh kedua penulis tadi tiada lain adalah pulau Bali, pulau Dewata tempat bersemayamnya Dewa-Dewi dari Kahyangan, tempat Maharesi memantapkan *tapa-semadi* dan mencapai kelepasan.

Pemberian nama seperti itu dilandasi oleh beberapa alasan di antaranya: *Pertama*, mayoritas penduduknya menganut Hindu Dharma yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai umat Hindu bangun pagi, melaksanakan kegiatan keseharian, sampai pada melakukan kreativitas kesenian, seluruhnya mencerminkan nilai-nilai Hindu; *Kedua*, tata kemasyarakatan diatur berdasarkan prinsip harmoni *Tri Hita Karana*, sehingga masyarakat senantiasa dituntut untuk tetap menjaga keselarasan dan keseimbangan hubungan antara dirinya dengan Tuhan sang maha pencipta, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungan alam; *Ketiga*, masyarakat Bali memiliki aneka ragam kesenian persembahan dan tontonan yang sarat dengan nilai filsafat kehidupan, terutama berhubungan dengan konsepsi dualisme yang dibuat hitam-putih, bahwa perilaku yang dilandasi oleh kecurangan, kejahatan, ketidakjujuran, keserakahan pada akhirnya akan mengalami kekalahan dan kehancuran.

Ketiga fenomena itu lahir dari tatanan nilai Hindu, terutama pada dorongan konsepsi *bakti marga* dan *karma marga*. Masyarakat Bali disosialisasi dan dibesarkan oleh tuntutan hati nurani untuk mempersembahkan yang terbaik dari yang mereka miliki, mereka terbiasa bekerja tanpa motivasi terhadap hasil yang berlebihan. Dengan landasan moral Hindu Dharma, mereka berusaha bekerja sebaik-baiknya sebagai bentuk persembahan. Karena itu, bagi sebagian besar masyarakat Bali kerja adalah *yadnya*.

Identitas berarti ciri-ciri atau sifat-sifat khas yang melekat pada sesuatu sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan sesuatu yang lain. Terkait dengan kebudayaan, identitas merupakan ekspresi eksistensi budaya suatu kelompok. Identitas etnik misalnya dapat ditentukan oleh faktor-faktor material budaya, seperti makanan, pakaian, perumahan, peralatan, dan faktor-faktor nonmaterial seperti bahasa, adat istiadat, kepercayaan, cara berfikir, sikap, dan lain-lain (Liliweri, 2005:48). Akan tetapi identitas budaya tidak datang sendiri, melainkan dibentuk atau dibangun oleh sebuah interaksi dinamis antara konteks (dan sejarah) dan *construct*. Oleh karena itu sifatnya situasional dan berubah, disusun dalam hubungannya dengan sejumlah *other* (Maunati, 2004). Mengikuti definisi ini, maka identitas dibentuk atau dibangun melalui sebuah proses yang terus-menerus menjadi. Selanjutnya identitas menentukan keberadaan suatu kelompok dengan lainnya dalam suatu masyarakat yang multikultur.

Manusia Bali dalam hal ini bukanlah setiap orang yang dilahirkan di Bali, dibesarkan, atau berdomisili di Bali; bukan juga orang yang menggunakan atribut-atribut kebudayaan Bali; yang dapat berbahasa Bali dengan fasih; juga bukan semua orang yang beragama Hindu. Identitas manusia Bali, justru dicerminkan dalam sikap dan perilaku kesehariannya, serta tata cara berinteraksi dalam masyarakat yang lebih luas. Komunitas migran diluar Bali misalnya, dengan jelas dapat dilihat identitas ke-Bali-annya jika mereka tetap melaksanakan budaya Bali dalam keseharian hidupnya. Sebaliknya, orang Bali yang tidak lagi menggunakan kebudayaan Bali sebagai panduan sikap dan perilakunya, maka ia telah kehilangan identitasnya sebagai manusia Bali.

Mengingat budaya Bali di masing-masing daerah menunjukkan ciri-ciri yang bervariasi, unik, dan khas. Antropolog pada umumnya membedakan dua bentuk masyarakat Bali akibat kuat-lemahnya pengaruh kebudayaan Hindu-Jawa (Majapahit) pada zaman dahulu, yakni, masyarakat *Bali Aga* dan Bali Majapahit (*wong Majapahit*)

Masyarakat *Bali Aga* adalah masyarakat yang kurang sekali mendapat pengaruh kebudayaan Hindu Jawa. Mereka umumnya tinggal di daerah pegunungan dalam kelompok-kelompok terpisah seperti masyarakat Tenganan (Karangasem), Trunyan (Bangli), Sembiran, Julah, Sidatapa, Pedawa, dan Tigawasa (Buleleng). Masyarakat kelompok ini juga menyebut diri sebagai masyarakat *Bali Mula*. Masyarakat Bali Aga yang tidak tunduk terhadap penguasa Majapahit cenderung mengisolasi diri sehingga mereka menjadi kelompok masyarakat yang terpisah-pisah diantara masyarakat pendatang baru. Walaupun secara umum dikelompokkan dalam satu kelompok Bali Aga, mereka memiliki berbagai perbedaan, seperti sistem penguburan, ritual keagamaan, dan struktur kepemimpinan adat (Bagus dalam Koentjaraningrat, ed. 1988: 286)

Sementara itu, orang Bali Majapahit merupakan bagian paling besar dari pada penduduk Bali pada umumnya menempati daerah-daerah dataran. Masyarakat ini hidup dalam ikatan *Desa Pakraman* yang dicirikan dengan adanya *Kahyangan Tiga*. Mengenai perbedaan antara masyarakat Bali Aga dan Bali Majapahit, setidaknya dapat juga dirujuk dari pendapat Liefrinck bahwa masyarakat Bali Aga mencirikan sebuah desa tradisional yang disebutnya “republik mikro”, yang bersifat demokratis, otonom, egaliter, dan memiliki sifat religius. Sementara itu, Bali Majapahit meskipun desa adatnya memiliki ciri yang serupa, tetapi pengaruh sistem kerajaan masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat misalnya, sistem *puri-panjak*, *siwa sisya*, dan juga *sor-singih basa*.

Meskipun terdapat perbedaan antara masyarakat *bali Aga* dengan *Bali Majapahit*, namun kebudayaan sama-sama terintegrasi dalam sebuah desa adat dan *Desa Pakraman*. Oleh karena itu, *Desa Pakraman* beserta nilai-nilai yang ada di dalamnya merupakan identitas kebudayaan Bali, yang dalam pelaksanaannya di masing-masing daerah memiliki perbedaan-perbedaan dalam kerangka *desa-kala-patra*. Kehidupan *Desa Pakraman* pada intinya mencakup upaya-upaya masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan (*sukerta*) melalui tiga hubungan harmonis, yakni dengan Tuhan (*sukertaning parahyangan*), dengan sesama manusia (*sukertaning pawongan*), dan dengan alam dan lingkungannya (*sukertaning palemahan*). Ketiga hubungan inilah yang sesungguhnya menjadi landasan kebudayaan Bali, sehingga manusia bali dapat dirumuskan identitasnya sebagai manusia yang religius, menjunjung tinggi persaudaraan (*panyamabrayan*) dan kebersamaan (*paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung sabayantaka*), dan yang mencintai alam dan lingkungannya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Unsur-unsur Kebudayaan Bali**

#### **1. Agama Hindu Bali**

Modernisasi dan globalisasi yang disemangati oleh kapitalisme liberalisme, menyebabkan setiap pemeluk agama bebas mendefinisikan agama sesuai dengan keinginannya (Soares & Sudarsana, 2018). Oleh karena itu agama tidak lagi menjadi sumber nilai dan norma yang dibagi bersama sebagai pedoman perilaku hidup kolektif dalam kehidupan sosial dan budaya. Melainkan keberagamaan lebih merupakan pendefinisian ulang (reognisi) agama melalui proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi yang lebih bersifat individual dalam penafsiran dan pemahaman secara terus menerus. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer seorang individu atau kelompok dengan mudah dapat meracik agamanya berdasarkan pengetahuan keagamaannya. Agama telah menjadi urusan privat sehingga setiap individu dapat meninggalkan agama lama dan beralih ke bentuk-bentuk keagamaan baru untuk mengisi kekosongan rohaninya.

Fenomena keagamaan semacam ini ditandai dengan bermunculannya aliran-aliran yang menjadikan “Spiritualitas” sebagai tema sentralnya. Mulai dari aliran yang sifatnya lokal seperti *Dharma Murti, Sandhi Murti, Cakra Naga siwa Sampurna* (yang menekankan mistis bali: *Kanda Pat*) sampai aliran-aliran yang diadopsi dari luar Indonesia, misalnya *Falun dafa/Falun gong, Sai Baba, Hare Krisna, Brahma Kumaris,*

*Ananda Marga*, dan lain sebagainya. Aliran-aliran tersebut sebagian berinegrasi dengan keagamaan masyarakat lokal (baca: Hindu Bali), sebagian netral dan sebagian lainnya “menentang” agama lokal. Bentuk penentangan terhadap agama Hindu Bali dimunculkan dalam wacana-wacana misalnya, “Hindu Bali tidak memiliki landasan spiritual yang kuat karena hanya mengutamakan *banten*”, Hindu bali bertentangan dengan Weda” atau Hindu Bali memberatkan masyarakat”. Ini artinya Hindu bali telah mengalami redefinisi yang beranekaragam sesuai dengan pengetahuan masing-masing individu. Malahan tidak sedikit yang menyatakan bahwa agama Hindu bali sudah tidak relevan lagi dengan keagamaan masyarakat modern yang menginginkan efektivitas, efisiensi dan kemudahan-kemudahan lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan bila masyarakat yang tidak mampu berafiliasi ke agama Hindu Bali, mencari idola-idola baru yang dipandang dapat memenuhi kehausan religiusnya.

Bagi masyarakat bali yang memeluk agama Hindu, maka India segera menjadi idola untuk memenuhi kehausan spiritual mereka, karena secara faktual India adalah tempat lahirnya agama Hindu. Oleh karena itu setiap bentuk keagamaan apapun yang bernuansa India segera mendapat tempat di hati umat Hindu di bali. Akibatnya terjadi “migrasi” keagamaan dari “Hindu bali” ke “Hindu India”, dengan intensitas yang berbeda. Bagi sebagian masyarakat, Hindu bali tetap dianut dan Hindu India menjadi pengisi kekosongan ruang rohani yang tidak didapatkan selama ini. Sebaliknya, ada yang benar-benar meninggalkan cara-cara beragama Hindu Bali dan digantikan dengan bentuk keagamaan baru, misalnya dengan *bhajan*, *agni hotra*, dan lain sebagainya.

Masyarakat Bali dasarnya memang memiliki sikap terbuka terhadap masuknya kebudayaan-kebudayaan lain, Namun demikian, sejarah masuknya agama Hindu ke Bali pada masa silam menunjukkan hal yang sangat berbeda dengan fenomena masuknya *sampradaya* belakangan ini. Masuknya agama Hindu ke Bali pada masa lalu terjadi secara dialogis sehingga identitas budaya lokal tidak dihilangkan, melainkan dipermulia. Kepercayaan lokal seperti adanya kehidupan setelah kematian dipermulia dengan ajaran *punarbhawa* dalam agama Hindu. Oleh karena itu, agama Hindu hidup dan kebudayaan bali menjadi dua fenomena dari satu realitas. Jalinan kedua fenomena tersebut sulit dipisahkan karena keduanya hadir bersamaan dalam sistem budaya masyarakat yang mentradisi dalam adat istiadat. Artinya baik disadari ataupun tidak Hindu telah menjadi identitas, bahkan kepribadian orang Bali yang menyebabkan kebudayaan Bali bertahan dalam berbagai gelombang pemikiran.

Menurut catatan Goris, bahwa di Bali pada mas silam juga telah dimasuki oleh berbagai aliran keagamaan dari India, yang di sebut *paksa*. Menurut Goris setidaknya ada 9 paksa yang pernah berkembang di Bali dan jejaknya masih bisa ditemukan sampai sekarang, yaitu: *saiwa Sidhanta, Pasupata, Bhairawa, Waisnawa, Bodha/Sogata, Brahma, Rsi, Sora, dan Ganapatya* (Goris, 1968: 4). Mpu Kuturan yang pada masa itu dapat dikatakan menjadi ketua majelis agama Hindu yang bernama “*Pakiran-kiran I Jero Makabehan*” mengadakan paruman agung yang menghasilkan kesepakatan bahwa sekte-sekte Hindu yang bermacam-macam ini difusikan, diwadahi, dan di payungi dengan konsep *Tri Murti*. Pemikiran berikutnya lahir dari Dahyang Dwijendra yang memelopori pendirian *Padmasana* atau *Sanggar Agung* sebagai tempat pemujaan Ida *Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang maha Esa* (Ardana, 1982: 36).

Fenomena *sekte* atau *paksa* dalam sejarah bali silam, tentu sangat bertolak belakang dengan masuknya *sampradaya* ke Bali belakangan ini. Fenomena masuknya *sampradaya*, justru menunjukkan bahwa orang bali telah kehilangan jenius lokal yang selama ini menjadi filter bagi masuknya kebudayaan asing. Kebanggaan dalam menggunakan identitas Hindu India menjadi satu indikator bahwa orang bali mulai mengalami kegamangan identitas keagamaannya.

Hindu Bali dimaksudkan disini adalah agama Hindu yang dilaksanakan dalam koridor kebudayaan Bali. Di sini perlu ditegaskan bahwa dengan menggunakan kata “Hindu”, maka Hindu bali mengakui dan mengamalkan ajaran *Catur Veda* (Saputra dkk, 2018). Sebagai kitab suci, yang pelaksanaannya berlandaskan pada Tri Kerangka Agama Hindu, *tattwa, susila, dan acarya*. *Tattwa* merupakan landasan filosofis ajaran agama, yakni bersumber pada *siwa-buddha tattwa*; *susila* merupakan landasan dan pedoman moral meliputi ajaran tentang tingkah laku (nilai-nilai dan norma-norma moral), seperti *Tri kaya Parisudha*; dan *acara* merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan beragama meliputi tradisi aktivitas-aktivitas hidup keagamaan (*upacara dan upakara*), yakni *Panca Yadnya*. Ketiga kerangka ajaran tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dan secara riil dapat dilihat dalam aktivitas keagamaan masyarakat Hindu bali di wilayah *Desa Pakraman*. Di *Desa Pakraman* inilah agama Hindu Bali diwujudkan sebagai pengalaman empiris dalam bentuk *Panca Yadnya*, meliputi *Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusia yadnya, dan Bhuta Yadnya*, baik sehari-hari (*Nitya Karma*) maupun secara insidental (*Naimitika Karma*).

Merujuk pada uraian di atas dapat dirumuskan ciri-ciri agama Hindu bali yang sekaligus menjadi identitas religius masyarakat bali antara lain, (1) bersumber pada *Siwa-*

*Buddha Tatwa*; (2) memiliki keterkaitan dengan *Kahyangan Tiga*; (3) melaksanakan *Panca Yadnya*; (4) menggunakan upakara (*banten*) sesuai dengan tradisi yang bersumber pada kitab suci hindu dan lontar-lontar yang ada di bali; (5) dalam lingkungan keluarga dicirikan dengan adanya *sangghah* atau *kemulan*; dan (6) menjadikan etika Hindu sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, *Peruman Para Wiku Loka Sabha V*, Parisada Dharma Hindu Bali merumuskan identitas religius masyarakat bali yang dituangkan dalam Piagam Campuhan, tahun 2007 di Pura Samuhan Tiga. Piagam Campuhan dengan tegas menyatakan bahwa identitas agama hindu Bali memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan agama mengacu pada *Weda sruti, Weda Smerti, Darsana, Tantra*, dan kearifan lokal yang disarikan ke dalam lontar-lontar.
  2. Landasan keimanan (Sradha) kepada Tuhan adalah *Siwattwa* dengan paham monisme (*Ekatva Anekatva Svalaksana Bhatara*).
  3. Menyembah tuhan (Sanghyang Widhi) lebih khusus disebut Bhatara Siwa, Dewa-Dewi dan Hyang Leluhur.
  4. Mempunyai tempat pemujaan yang disebut *Sangghah/Pamerajan* dan Pura
  5. Melaksanakan upacara *Panca Yadnya* menggunakan *banten* dengan pakemnya yang khas dipimpin oleh *Wiku Huwus Kertha Diksita* dan *Pemangku* dengan atribut serta sarana yang khas pula.
  6. Agama Hindu yang menjadikan sosio-kultural bali sebagai media pelaksanaannya.
- Dengan demikian, agama Hindu Bali memiliki karakter khas yang membedakannya dengan agama Hindu di wilayah yang lain.

Dalam rangka membangun identitas keagamaan, agama Hindu Bali penting untuk tetap dipertahankan eksistensinya dari gempuran budaya global. Mengingat secara eksistensial, keberadaan agama Hindu bali tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan bali itu sendiri. Menghilangnya eksistensi agama Hindu Bali maka dapat dipastikan kebudayaan balipun akan menghilang, mengingat hampir semua aktivitas kebudayaan bali dikaitkan dengan aktivitas keagamaan dalam konsep *ngayah* dan kebersamaan. *Ngayah* dan kebersamaan merupakan ciri dari kultur agraris yang sejauh ini telah menjadikan agama Hindu Bali tumbuh subur. Oleh karena itu, untuk mempertahankan agama Hindu bali dari berbagai gempuran budaya asing adalah dengan mempertahankan kultur agraris tersebut, tentunya dengan mengadopsi cara-cara modern, pemanfaatan IPTEK misalnya.

Agama Hindu Bali menjadi sistem nilai dan norma yang diimplementasikan dalam sistem tindakan dan sistem sosial di Desa Pakraman, serta diwujudkan dalam bentuk material-material budaya yang agung dan mempesona. Bali yang tanpa Desa pakraman, Bali yang tanpa Pura, Bali yang tanpa yadnya, Bali yang hilang keramah-tamahan penduduknya, berarti Bali yang telah hilang ke-Bali-annya.

Agama Hindu bali merupakan sumber nilai dan jiwa *Desa Pakraman*. Oleh karena itu, segala aktivitas di *Desa Pakraman* merupakan implementasi nyata dari pelaksanaan ajaran agama Hindu, baik secara individu maupun komunal. Keberadaan *Kahyangan Tiga* sebagai syarat mutlak bagi sebuah *Desa Pakraman* semakin mempertegas makna bahwa dasar pembentukan *Desa Pakraman* adalah *religiusitas*. Dengan demikian, pemberdayaan Desa Pakraman harus dimulai dengan meningkatkan pemahaman krama adat terhadap ajaran agama Hindu Bali, menyangkut *aspek tattwa, susila, dan acara*. Dalam konteks inilah *desa Pakraman* harus dapat menjadi *pasraman* bagi krama untuk mendalami dan meningkatkan *sradha* dan *bhakti*. Disamping itu *Desa Pakraman* juga harus menjadi pusat terlaksanakannya seluruh aktivitas keagamaan Hindu dalam wujud *Panca Yadnya*.

## 2. Agama Sebagai Sumber Berkesenian

Dalam *Aji Sangkya* (Ida Ketoet Djlantik, 1947) sebuah teks *Siwa Tatwa* disebutkan bahwa paham *dwaita* atau dualisme berkaitan dengan adanya dua azas pertama yang tak bersebab, tetapi menjadi sebab segala yang tercipta. Adanya suci abadi, maha gaib, dan tak terpikirkan. Dua azas itu disebut *Cetana* (Siwa adalah azas yang sadar) dan *Acetana* (Maya adalah azas yang lupa). Pertemuan keduanya melahirkan *Purusa* (azas roh) dan *Predana* (azas materi). Sinerji antara *Purusa* dengan *Predana* terciptalah alam semesta beserta isinya. Tidak ada sesuatu apapun yang tercipta tanpa pertemuan antara *Purusa* dengan *Predana* (Mardawa dkk, 2018).

Jika dipahami secara lebih rinci paham *dwaita* pada karya ini, disebutkan bahwa Siwa dalam sadar-NYA yang terluhur yang tak berguna (*nirguna*) tak bersifat, tak berwujud, tak terpikirkan, dan gaib. Sebaliknya, Siwa dalam sadar-NYA: sempurna kehendaknya (*sida sakahyun*), dan sempurna karyanya (*sida sakarya*). Ia adalah Siwa yang berguna (*saguna*). Ketika Siwa menyatukan diri dengan Maya (*Siwatma*), sadar-NYA masuk menyusupi lupa. Akibatnya, Ia aktif berkehendak untuk menciptakan segalanya. Karena itu terciptalah *Purusa* dan *Predana*. *Purusa* adalah putra Siwa yang lebih mewarisi sadar-NYA untuk ingin tahu segala sesuatu. Sedangkan *Predana* adalah putri-NYA yang lebih mewarisi lupa ibunya, Maya, sebagai yang diketahui.



Dalam *Jnanasiddhanta* karya Haryati Soebadio (1985: 87) yang mengacu karya Hooykaas (1966) secara eksplisit menyatakan bahwa paham *dwaita* dapat dipahami dari ucapan *Ang-Ah* yaitu pengetahuan tanpa keragu-raguan mengenai *Ada* dan *Tidak Ada*, sebagai pengetahuan yang tidak berwujud. Lebih lanjut dinyatakan bahwa bunyi *Ang*, merata di seluruh tubuh dan juga lewat sembilan lobang. Dengan kedudukan tubuh seperti itu, tubuh dibaratkan sebagai meditasi matahari (*suryasuti*). Sedangkan ucapan *Ah*, adalah nafas yang meninggalkan tubuh yang dipersonifikasi sebagai bulan, kelihatan cantik, dan jernih. Karena sifatnya yang cantik dan jernih, maka disebut dengan meditasi rembulan. Manakala tercapai penyatuan antara meditasi matahari dan rembulan, maka timbullah *Pranava-jnana*. Penyatuan *Sang Hyang Param Brahma* dan *Sang Hyang Pranava Jnana* menciptakan *Paranjyotirupa*.

Di dalam Rajayoga (Triguna, 1997: 317) aksara *Ah* adalah nafas vital di bagian kanan, sedangkan *Ang* nafas vital di bagian kiri. Di bagian kanan berstana *Sada Siwa*, sedangkan di bagian kiri berstana *Dewi Gayatri*. Di sebelah kanan sifat-sifat maskulin, sementara sifat feminim menjadi ciri di bagian kiri. Semua itu adalah *Pranawa Kundalini* dalam keadaan terbalik. Dualisme *Ah* dan *Ang* tidak berfungsi optimal jika tidak disatukan. Karena itu, manakala seseorang mampu menyatukan makna kedua kekuatan dan kiblat aksara ini (agar menjadi A), yang dalam mikrokosmos terletak di tengah-tengah kening, maka akan memiliki kekuatan *amerta*.

Paham *dwaita* atau dualisme dapat pula dipahami melalui konsepsi *Ardanariswari*, yaitu simbol Tuhan dalam manifestasi sebagai setengah *Purusa* dan *Predana*. Kedudukan dan peranan *Purusa* disimbolkan dengan *Siwa*, sedangkan *Predana* disimbolkan dengan *Dewi Uma*. Di dalam proses penciptaan, *Siwa* memerankan fungsi maskulin, sedangkan *Dewi Uma* memerankan fungsi feminim. Tiada sesuatu apapun akan tercipta, jika kekuatan *purusa* dan *predana* tidak menyatu. Penyatuan kedua unsur itu diyakini telah memberikan bayu bagi terciptanya berbagai mahluk dan tumbuhan yang ada.

Konsepsi *dwaita* dalam Hindu sebagaimana telah diuraikan di atas dalam kenyataannya telah menjadi bagian penting dari tatanan kultural dan sosial masyarakat Bali. Pada tatanan kultural tampak pada konsepsi masyarakat Bali mengenai arti penting *Ulu* dengan *Teben*; antara *giri* dengan *segara*; perbuatan baik berhadapan dengan perbuatan tidak baik; antara hal-hal yang *suci* berhadapan dengan hal-hal yang bersifat *leteh*; dan antara *niskala* berhadapan dengan *sekala*, dan antara *Dewa* dengan *Bhuta*.

Pada tatanan sistem sosial, konsepsi *dwaita* juga tampak pada pola menetap masyarakat Bali yang menempatkan *Kaja* dan atau *Kangin* sebagai arah *suci*. Sedangkan arah sebaliknya dipandang sebagai arah yang *leteh*. Tidak hanya dalam konsepsi inti seperti itu, tetapi tampak pula pada aspek kesenian antara kesenian *Wali* dengan kesenian *Balih-balihan* atau klasifikasi seperti dibuat Burman Hall (1996). Adanya terminologi antara warga *pengarep* dengan warga *sampingan*; antara *kerama lanang* dan *kerama istri*, merupakan terminologi untuk mengukuhkan betapa konsepsi *dwaita* dalam masyarakat Bali sangat bernilai sosial, terlebih kultural.

### **3. Adat Bukan Sesuatu yang A-Historis**

Adat dan tradisi adalah sebuah konsepsi yang dianggap bernilai dalam suatu komunitas tertentu pada jamannya. Selain berupa nilai konsepsi itu juga berwujud suatu cara, pola tindakan, dan struktur sosial. Adat dan tradisi acapkali diyakini sebagai representasi komitmen moral para anggota komunitas pendukungnya untuk hidup bersama secara damai dan berbudi. Sebagai komitmen moral yang diyakini bernilai, maka menjadi kewajiban bagi setiap anggota untuk memelihara, melestarikan, dan memaknainya dengan cara yang paling baik menurut ukuran nilai mereka.

Tradisi sebagai kesatuan komitmen yang berlaku pada jamannya, bukanlah sesuatu yang a-historis dan tidak mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu berbagai 'kebutuhan baru' muncul yang dianggap sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Kebutuhan baru itu dalam perjalanannya sebagian telah diadaptasi, diakomodasi, dan dijadikan acuan bersama. Dalam kenyataannya, terdapat pula komitmen moral yang tadinya dirumuskan untuk tujuan baik, dalam implementasinya dewasa ini telah mengalami benturan dan malahan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap substansi, konteks, dan relevansinya. Semua itu merupakan dorongan alamiah yang bersifat internal, yang menandakan bahwa tidak ada satu pihakpun yang terhindar dari proses perubahan. Perubahan semakin terasa kuat bersamaan dengan derasnya pengaruh faktor eksternal, yaitu modernisasi dan globalisasi.

### **4. Agama dan Adat Kaitannya dengan Pengembangan Kesenian**

Di depan telah dijelaskan bahwa *bhakti marga* menekankan pada penyerahan diri sedalam-dalamnya kepada Hyang Widhi Wasa. Ada dua katagori bhakti, yaitu apara bhakti dan para bhakti. Bhakti yang pertama biasanya dilakukan oleh mereka yang pengetahuan keagamaannya belum maju. Mereka masih membutuhkan simbol sebagai wujud persembahan. Dalam realitasnya, sebagai wujud cinta kasih dipersembahkanlah

berbagai hal terbaik yang dimiliki manusia. Seorang petani akan mempersembahkan hasil pertanian yang mereka peroleh. Seorang seniman akan berusaha mewujudkan rasa bhakti dengan cara mewujudkan simbol-simbol keramat dan atau indah tentang Tuhan. Dengan demikian, tumbuh dan berkembang berbagai simbol dan tindakan yang bersifat ekspresif dalam kaitannya dengan usaha manusia mengagungkan Tuhan serta tanda manusia pasrah kepada kekuatan yang *supreme*. Lahirlah ritus-ritus keagamaan dengan berbagai sarana upacara (upakara) yang tidak pernah lepas dengan eksistensi Tuhan.

Upacara *yadnya* yang dilandasi oleh asumsi “*dengan yadnya para Dewa memelihara manusia dan dengan yadnya pula manusia memelihara Dewa* (Reg Veda, X.90). Pelaksanaan *yadnya* semakin kompleks ketika dikaitkan dengan ajaran *panca-yadnya*. Axiomanya terjadi, ketika dipadukan antara konsepsi *panca srada*, *catur marga*, dan *panca yadnya*. Pelaksanaan *yadnya* itu semakin terpola dan ekspresif karena didukung oleh seni musik, tari, suara, ukir, dan sastra. Dalam seni tari dan tabuh misalnya, berkembang tari *wali*, *bebali*, dan *balih-balihan* yang tidak terlepas dengan konsepsi *tri-angga* dan *tri mandala*. Dalam bidang musik gambelan hampir seluruhnya pula dapat diklasifikasikan ke dalam tiga katagori sebagaimana digambarkan Burman-Hall (1996: 1-21). Perpaduan seni suara, sastra, dan gambelan telah menghasilkan *gegitaan*. Seni lukis dan kriya juga tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan nilai-nilai agama Hindu.

Pernyataan di atas telah memberikan gambaran bahwa pelaksanaan *yadnya* di Bali didukung oleh seni dalam arti luas, malahan terkesan seni itu melekat dalam *yadnya*, karena keindahan itu sendiri dipersembahkan kepada Tuhan sebagai wujud *bhakti* manusia. Sebaliknya agama diyakini sebagai sumber inspirasi berkesenian. Luluhnya seni dalam ritual agama tidak dapat dilepaskan dari wadah proses diobjektivasi. Di samping melalui lembaga keluarga dalam arti luas, peran lembaga tradisional *sekaa*, *banjar*, dan *desa* amat penting dan strategis. Bersamaan dengan tumbuhnya semangat kebalian pada masyarakat Bali di Bali, telah menonjolkan kedudukan dan peranan desa adat melebihi fungsi lembaga lainnya. Akibatnya, semakin tumbuh berbagai kesenian yang pada akhirnya berfungsi menguatkan eksistensi adat dan agama. Salah satu penguatan itu misalnya tampak pada berkembangnya konsepsi *Tri Hita Karana* dalam berbagai aspek kehidupan (hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan lomba desa adat yang dilaksanakan oleh Pemda Bali melalui MPLA sejak tahun 1984).

*Tri hita karana* sebagai konsepsi kebudayaan, terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat desa adat (Triguna, 1997; Triguna, 2000; Wesnawa; 2002), yaitu *pertama*, hubungan manusia dengan Tuhan (*sukerta tata agama*). Konsepsi ini

menekankan penting *kahyangan tiga* bagi eksistensi desa adat. Terpeliharanya *pelinggih* dan ritus di setiap *Kahyangan*, terbinanya seni sakral, pesantian, dan berbagai bentuk pendalaman agama di suatu desa adat merupakan isi inti konsepsi *sukerta tata agama*.

**Kedua**, hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*) dalam terminologi lain juga disebut *sukerta tata pawongan*. Dalam dimensi ini ditekankan adanya etika dalam bertingkah laku, baik di lingkungan keluarga, antarkeluarga, banjar, dan desa adat. Etika dimaksud adalah setiap warga desa adat memiliki kedudukan dan peranan yang sama di depan aturan adat, sepanjang yang bersangkutan telah menjadi *krama*. Dalam persamaan hak dan kewajiban itu, kemudian ditekankan pentingnya *principle of reciprocity*, yaitu kewajiban untuk memberi dengan harapan menerima hal yang sama. Senerji dua faktor ini menyebabkan masyarakat desa adat di Kabupaten Badung cenderung homogen dalam referensi nilai, karakter, dan pilihan terhadap alternatif yang tersedia dalam hubungan menafsirkan serta memahami (*interpretative and understanding*) lingkungan sosial dan fisik. Kenyataan ini setidaknya terwakili dari didambakannya hubungan atas dasar prinsip *sagilik saguluk, salulung sabayantaka*.

Setiap *krama* merasa berkewajiban menjaga harmoni dengan sesamanya dengan cara sedapat mungkin menjaga agar mereka tidak dengan sengaja berusaha menonjol di atas *krama* lainnya (Triguna, 2001:8). Tindakan konformisme dan egaliter senantiasa diterapkan hingga menjadi sebuah pola (*pattern*). Artinya, tindakan itu bisa dilakukan kembali di masa mendatang dengan cara yang sama ekonomisnya. Pembiasaan akan membawa konsekuensi bahwa manusia tidak perlu lagi mendefinisikan kembali setiap situasi langkah demi langkah. Pembiasaan merupakan awal dari proses pelembagaan, yaitu terwujudnya tipifikasi yang timbal balik dari tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai tipe pelaku. Tipifikasi tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan, yang membentuk lembaga, selalu merupakan milik bersama sebagaimana dinyatakan Berger (1990: 75-77).

**Ketiga**, hubungan manusia dengan lingkungan atau *palemahan*, berkaitan dengan kejelasan batas wilayah desa adat, struktur kahyangan dan desa/banjar adat, serta pola menetap warga masyarakat desa adat sesuai konsepsi *tri mandala*. Setiap anggota desa adat diajarkan secara arif dan bijaksana menjaga keserasian hubungan dengan alam. Kebutuhan akan dunia sosial dan fisik, memperkuat asumsi bahwa manusia tidak dapat hidup secara baik jikalau mereka terasing dari lingkungan sosialnya. Tidak hanya itu, manusia juga sedapat-dapatnya berusaha memelihara hubungan yang selaras dengan alam dan lingkungan di sekitarnya berdasarkan prinsip hubungan timbal balik. Dengan

demikian, orang Hindu senantiasa berusaha memelihara hubungan-hubungan bermakna itu dengan berbagai cara yang tepat dalam situasi dan kondisi tertentu. Orang Hindu dalam setiap kesempatan selalu berusaha memelihara hubungan-hubungan itu melalui wacana, perlambang, dan tanda sebagai bagian strategi-kebudayaannya agar tetap dapat hidup dan bertahan sebagai manusia (*survival of the fittes*) sebagaimana dinyatakan oleh Hobbes.

Bertitik tolak dari ketiga dimensi itu (*parahyangan, pawongan, dan palemahan*), dapat dinyatakan bahwa *tri hita karena* sebagai konsepsi kebudayaan, dalam realitasnya dengan sistematis telah membentuk pengetahuan dasar (*basic term*) di kalangan warga *desa adat*. Pengetahuan itu, terutama berkaitan dengan kedudukan manusia di antara semesta alam sebagai makhluk yang malang; sementara pada horizon lain mereka harus dapat memelihara hubungan-hubungan bermakna di antara sesamanya berdasarkan prinsip timbal balik, dan hubungan manusia dengan alam.

Pengetahuan dasar tentang keberadaan yang *supreme (tri kahyangan)*; keharmonisan tindakan sosial dan antarhubungan sosial sebagaimana terimplementasi dalam konsepsi *sagilik saguluk, salulung sabayantaka*; dan keserasian dalam menjaga hubungan dengan alam fisik seperti dapat dipahami dalam konsepsi *tri mandala*, akhirnya membentuk 'mode' atau cara yang melembaga untuk hidup; dan terakhir membentuk pandangan tentang dunia (kosmologi), cara berkesenian, dan membentuk keteraturan itu. Dengan demikian, konsep hubungan manusia dengan alam pun juga dilandasi oleh prinsip *sagilik saguluk, salulung sabayantaka* yang intinya menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan alam melalui berbagai bentuk kesenian dan aktivitas kontemplasi lainnya.

## **5. Palemahan (Wilayah Desa)**

Wilayah Desa Pakraman, sering kali hanya dimaknai dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan, baik terhadap lingkungan, sosial, adat, dan budaya Bali. Dampak lingkungan pasti tak terelakkan, karena secara teori daerah pemukiman padat akan menyebabkan hilangnya paru-paru alam, juga dampak lainnya seperti kekumuhan, banjir, dan sebagainya. Dampak sosial yang akan ditimbulkan tentu lebih parah lagi, karena tingkat heterogenitas masyarakat dan masuknya berbagai kepentingan. Bagi adat dan budaya, dampak alih fungsi lahan dapat diprediksi akan merubah wajah Bali. Perlu diingat, bahwa ketika tanah telah beralih pemilik maka pemilik memiliki kewenangan untuk memperlakukan lahan yang dimiliki sesuai dengan kepentingannya. Ini menjadi

masalah baru jika lahan tersebut digunakan untuk membangun kafe, discotik, atau bahkan membangun tempat suci agama lain.

Mengingat besarnya dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat Bali akibat alih fungsi lahan, maka jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah melindungi tanah bali. Dalam konteks melindungi inilah, Desa Pakraman harus berperan aktif untuk menangkal kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan. Langkah yang harus dilakukan antara lain: (1) menginventarisasi tanah *druwe desa* dan *palaba pura*; (2) mempertegas batas wilayah *kekeran*, baik *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan* lainnya yang *di-empon* oleh *krama*; (3) Melindungi tanah produktif agar tidak beralih fungsi; (4) *Desa pakraman* harus berperan aktif dengan melakukan seleksi secara ketat terhadap proses jual-beli, terutama siapa yang membeli dan peruntukkan tanah yang dibeli; dan (5) setiap pembangunan yang akan dilakukan di wilayah *Desa Pakraman* harus mendapatkan persetujuan *Bendesa Adat* atas keputusan *Paruman Krama*.

## 6. Pawongan (Krama adat)

Pengertian *Desa Pakraman* dibuka dengan kalimat kesatuan masyarakat (*krama*) hukum adat. Ini menegaskan bahwa *Desa Pakraman* adalah kumpulan orang-orang yang mengikatkan diri atas dasar kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup umat Hindu. Dalam konteks sejarah, masyarakat Bali sebenarnya telah mengenal masyarakat desa yang di sebut *kraman* (dalam prasasti ditulis *keraman*), dan itu muncul pertama dalam prasasti dausa, Pura Bukit Indrakila tahun 942 M. Pada prasasti itu disebut nama Raja Paduka Haji Ugrasena (Prasasti Bali I, 1945: 71-72). Dalam prasasti lain yang ditemukan di desa Trunyan B tahun 911 M. Istilah Desa yang digunakan pada saat itu adalah *Vanua* atau *Banua*. Dapat diduga bahwa wujud desa pada masa itu merupakan pemukiman sekelompok orang yang telah mendiami daerah tertentu, ada kelompok pengurus/*prajuru desa* yang di tunjuk dari antara warga desa, bila ada Raja maka kekuasaannya tidak masuk mencampuri keadaan di desa. Jadi, Pengelolaan organisasi yang disebut *Kraman* ini sangat mandiri (otonom).

Mengingat desa Pakraman adalah kesatuan *krama* (*keraman*) maka unsur manusia menjadi kunci dalam pemberdayaan *Desa Pakraman* itu sendiri. Setidak-tidaknya pemberdayaan *krama desa pakraman* harus diarahkan untuk membentuk manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Dengan ketiga kecerdasan inilah krama Bali akan memiliki jati diri yang tangguh dalam menghadapi penetrasi budaya modern dan global.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa agama Hindu adalah jiwa *Desa Pakraman*, maka dari itu ketiga kecerdasan tersebut harus dibangun dengan pemahaman dan pendalaman nilai-nilai agama Hindu. Untuk membentuk manusia spiritual, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap *Tattwa* agama Hindu yang tertuang dalam kerangka *Panca Sradha*, dan *Siwatattwa*. Dalam aplikasinya, *Tattwa* ini harus diejawantahkan dalam tindakan keagamaan melalui *Panca yadnya*. Artinya *Desa Pakraman* harus bisa menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pelaksanaan *Panca Yadnya* sebagai implementasi dari ajaran agama Hindu Bali (Sudarsana, 2018).

Dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kecerdasan emosional diperlukan pemahaman dan pendalaman terhadap nilai-nilai etika Hindu, seperti *Tri Kaya Parisudha*, *Hukum Karma-Phala*, *Panca Yama* dan *Nyama Brata*. Tujuan utama dari pembangunan kecerdasan emosional tiada lain adalah untuk membentuk karakter krama yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran (*satya*), kasih-sayang (*prema*), kewajiban (*dharma*), tanpa kekerasan (*ahimsa*), dan kedamaian (*santih*), baik dalam aktivitas kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas *Desa Pakraman*.

Sementara itu, pembentukan karakter krama *Desa Pakraman* yang memiliki intelektualitas, bahwa *Desa Pakraman* harus memberikan dorongan kepada setiap krama untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, baik informal, nonformal maupun formal. Paradigma bahwa *Desa Pakraman* menghalangi krama untuk maju harus segera dirubah. Secara Informal bahwa *Desa Pakraman* harus menjadi pusat aktivitas pendidikan untuk mengembangkan bakat dan minat krama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti harus mampu membangkitkan *sekaa-sekaa* tradisional yang ada dimasyarakat, karena *sekaa-sekaa* ini merupakan tempat pendidikan manajerial dan teknikal skill. *Desa pakraman* di bali juga harus memberikan kesempatan kepada krama yang ingin melanjutkan pendidikan formal. Termasuk didalamnya bahwa *Desa Pakraman* di bali harus mampu menjadi motor penggerak suksesnya program pendidikan nasional. Hal ini akan semakin mengukuhkan eksistensi *desa Pakraman* sebagai institusi adat yang mampu bersinergi dengan program pemerintah, bahkan menjadi kunci sukses pembangunan. Krama yang memiliki tiga kecerdasan diatas merupakan layak disebut sebagai manusia susila. Secara lebih rinci, Krama *Desa Pakraman* yang susila dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Subuddhi*, yaitu krama *desa* yang berbudi luhur dan berakhlak mulia.
- b. *Susatya*, yaitu krama *desa* yang cinta pada kebenaran dan setia kawan.

- c. *Sudharma*, yaitu *krama desa* yang mengerti dan mampu melaksanakan tugas dan menjalankan kewajibannya.
- d. *Sukarya*, yaitu *krama desa* yang bermental kuat dan pekerja keras.
- e. *Subhakti*, yaitu *krama desa* yang tulus menjadi pelayan Tuhan, Alam, /lingkungan, dan sesamanya.

## 7. Seni dan Budaya Bali

Takperlu diragukan lagi bahwa seni dan budaya begitu melekat pada identitas Bali dan dikenal orang dari belahan dunia manapun. Memang, seni dan budaya dapat dikatakan sebagai satu-satunya potensi yang mampu menjadikan Bali begitu dicintai oleh dunia. Hal ini dapat dibandingkan dengan potensi yang lain, misalnya sumber daya alam, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan.

Bali nyaris tidak memiliki sumber daya alam yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, bahkan untuk Bali sendiri. Wilayah Bali yang cukup sempit, juga tidak memungkinkan bagi Bali untuk mendirikan perindustrian yang mampu menopang perekonomian Bali, seperti halnya daerah lain di Indonesia. Potensi politik apalagi, dengan hanya menempatkan sembilan (9) anggota DPR-RI dan empat (4) anggota DPD di Badan Legislatif pusat, tentu bukan daya tawar politik yang memadai bagi Bali. Sederhananya, jika 13 anggota dewan dari Bali bersuara di sidang DPR/MPR, tentu tidak akan banyak berpengaruh bagi keputusan yang akan dilahirkan. Apalagi, jiwa wakil Bali di dewan hanya diam dan sekedar menikmati fasilitas yang diberikan. Dari segi pertahanan dan keamanan, Bali terkepung oleh kekuatan mayoritas, sedangkan jumlah penduduk Bali juga tidak memadai untuk melakukan pertahanan rakyat apabila sewaktu-waktu Bali diserang oleh kekuatan luar.

Namun demikian potensi seni dan Budaya, serta *taksu* yang mengelilingi Bali, menjadikan pulau ini begitu disegani dan disenangi oleh dunia. Seni budaya ini juga, dalam beberapa dasa warsa terakhir telah menjadi potensi dominan yang menopang perekonomian Bali dan nasional melalui pengembangan kepariwisataan. Pariwisata budaya yang dikembangkan di Bali ternyata menjadi pembuka gerbang kesejahteraan masyarakat Bali. Sebagaimana diketahui bersama bahwa seni budaya Bali erat kaitannya dengan agama Hindu yang aktivitasnya dilaksanakan di *Desa pakraman*. Geliat pengembangan seni budaya Bali pada mulanya lahir dari *sekaa-sekaa* tradisional yang ada di *Desa Pakraman*, seperti *sekaa subak*, *sekaa gong*, *sekaa pesantian*, *sekaa magenjekan*, dan sebagainya. Dalam *sekaa-sekaa* tersebut terdapat nilai dominan yang menjadi spirit dalam berkesenian dan berkebudayaan, yakni *ngayah*.



Secara substansial, aktivitas *ngayah* adalah suatu pekerjaan yang tidak mengandung nilai ekonomis bagi pelakunya. Disisi lain aktivitas *ngayah* adalah aktivitas yang dilakukan semata-mata hanya demi kepentingan umum karena pekerjaan *ngayah* dilakukan secara komunal dalam konteks bermasyarakat dan tidak ada imbalan apapun secara ekonomis setelah perbuatan itu dilakukan. Misalnya *ngayah* pada saat ada upacara di *pura* dapat dilakukan dengan membuat berbagai macam sarana upacara, *ngayah mawarima* (menyanyikan kidung-kidung rohani). *Jero Mangku* yang menjalankan rangkaian upacara, juga dikatakan *ngayahin Ida Bhatara* (melayani Tuhan). Dalam konteks pawongan misalnya, seseorang yang ditunjuk menjadi *Bendese Adat* adalah orang yang dikatakan *ngayah* kepada masyarakat karena menjadi *bendesa adat* tidak mendapatkan imbalan apapun secara materi. Demikian juga *ngayah* dilingkungan juga tidak mendapatkan imbalan apapun secara material.

Konsep *ngayah* yang dikembangkan sekaa-sekaa tradisional dalam aktivitas kesenian dan kebudayaan adalah menjadikan aktivitas seni itu sebagai bentuk persembahan dan pelayanan kepada Tuhan. Hal ini dapat dilihat ketika *sekaa gong* dibentuk agar dapat *ngaturang ayah* pada saat piodalan di *Kahyangan Tiga*, juga krama yang belajar menari. Justru dengan konsep *ngayah* inilah, *sekaa-sekaa* begitu bergairah untuk mengembangkan segala daya cipta, rasa, dan karsa dalam berkesenian. Selain itu, pengembangan seni budaya melalui sekaa tradisional ternyata efektif untuk regenerasi.

Namun demikian, nilai *ngayah* dalam pengembangan seni budaya Bali belakangan ini cenderung mulai meluntur. Peran Desa Pakraman dalam pendidikan dan pembelajaran seni, budaya, serta tradisi telah diambil alih oleh lembaga-lembaga profesional, seperti sanggar-sanggar kesenian. Hal ini diperparah lagi dengan sikap pemerintah yang kurang memperhatikan keberadaan sekaa-sekaa lokal untuk mewakili Bali dalam event-event internasional. Penyelenggaraan PKB misalnya, cenderung di dominasi oleh sanggar-sanggar kesenian, dan ISI sebagai pengisi acaranya. Padahal ide awal pembentukan PKB sesungguhnya adalah untuk membangkitkan sekaa-sekaa yang hidup dibanjar-banjar atau desa Pakraman.

Melihat fenomena tersebut, Desa Pakraman harus dikembalikan peranannya dalam pemberdayaan seni-budaya Bali. Strategi yang dapat diterapkan dalam hal ini antara lain : (mengembalikan fungsi Desa Pakraman sebagai pusat pengembangan kesenian, tradisi, dan adat-istiadat; (2) membangkitkan kembali sekaa-sekaa tradisional di Desa Pakraman ; dan (3) mendorong pemerintah agar menunjuk selaa-sekaa lokal untuk mewakili Bali dalam berbagai event, baik lokal, nasional, maupun internasional.

## 8. Awig-Awig

Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh *Desa Pakraman* sebagai institusi otonom adalah menetapkan *awig-awig* berdasarkan musyawarah (*paruman*) *krama*. *Awig-awig* adalah seperangkat aturan yang menjadi panduan segala aktivitas yang dilaksanakan di *Desa Pakraman*. *Awig-awig* mengatur tiga landasan filosofis kebudayaan Bali, yakni *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Melalui *awig-awig* tata *parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* ini diatur dan diarahkan untuk mencapai *sukertha* (seimbang, serasi, dan harmonis).

Pada kenyataannya, *awig-awig* di satu *Desa Pakraman* biasanya berbeda dengan *awig-awig* di Desa lainnya. Mengingat di Bali terdapat 1371 desa adat maka tingkat keragaman *awig-awig*, juga lumayan banyak. Untuk itu perlu, perlu dipikirkan untuk membuat aturan yang sama bagi semua desa adat di Bali untuk hal-hal khusus, seperti:

- a. Di bidang *Parhyangan*, perlu dipikirkan untuk membuat satu *awig-awig* seragam untuk seluruh *Desa Pakraman* di Bali, terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan keagamaan yang sering kali menimbulkan kontroversi, seperti manak salah, *Nganten negen*, Salah Pati-Ulah pati, dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan agar setiap *Desa Pakraman* di Bali memiliki persepsi yang sama dalam menyikapi masalah-masalah keagamaan yang cukup krusial tersebut. Untuk menyusun *awig-awig* di bidang *Parhyangan* ini ini buku “Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu” dapat dijadikan sebagai panduan.
- b. Di bidang *Pawongan*, perbedaan krusial yang sedang dihadapi Bali terutama adalah *Krama Tamiu*. Perbedaan *awig-awig* antara daerah yang satu dengan yang lain, terkadang menimbulkan kerancuan dalam memperlakukan *krama tamiu*. Di satu *Desa Pakraman* bisa sangat longgar, tetapi di daerah yang lain bisa sangat ketat. Untuk itu perlu ada kesepakatan dari seluruh *Desa pakraman* di Bali untuk dituangkan ke dalam *awig-awig*.
- c. Di bidang *Palemahan*, ada persoalan krusial yang dihadapi Bali, yakni alih fungsi lahan dan pelanggaran radius kesucian *pura*. Meskipun perlu ada aturan atau *awig-awig* yang berlaku bagi seluruh *desa Pakraman* di Bali, tetapi itu berlaku hanya untuk hal-hal khusus yang krusial. Selebihnya, pembuatan *awig-awig* secara umum harus tetap sejalan dengan *Drsta* yang berlaku di masing-masing daerah.

## Kesimpulan

Bali telah berubah. Perubahan ini selain disebabkan oleh perubahan sikap dan karakter orang Bali, juga oleh berbagai faktor eksternal yang menyebabkan Bali berada dalam keterkepungan diberbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, budaya, dan agama. Untuk menghadapi keterkepungan ini, orang Bali harus memiliki strategi kebertahanan dari berbagai masalah dan tantangan yang menerpa.

Salah satu strategi yang efektif untuk mempertahankan eksistensi adat, budaya dan agama Hindu Bali adalah pemberdayaan Desa Pakraman. Mengingat *Desa Pakraman* adalah institusi otonom yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Otonomi itu meliputi, otonom dalam membuat aturan-aturan (*awig-awig*) sendiri; otonom dalam menjalankan organisasi yang telah mentradisi misalnya, dalam hal pemilihan *klian/bendesa adat*, memberi sanksi kepada anggota yang melanggar, menyeleksi pendatang baru dari luar *Desa pakraman*; dan otonom dalam penerapan aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama melalui *paruman desa adat*.

Dalam pemberdayaan *Desa Pakraman*, peran pemerintah sangat diperlukan, tetapi bukan untuk menghegemoni *Desa Pakraman* sehingga kehilangan semangat otonomnya. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta pemberian perangsang berupa insentif atau sumbangan pembangunan, hendaknya diarahkan untuk meningkatkan gairah *Desa Pakraman* dalam melaksanakan *swadharma-nya* menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat, serta terwujudnya *sukerthaning tata parhyangan, pawongan, palemahan*.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Irawan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ardana, I Gusti Gde. 1982. *Sejarah Perkembangan Hinduisme di Bali*. Denpasar
- Astra, I Gde. Semadi, Aron Meko Mbeté, Ida Bagus Puja Astawa, I Nyoman Darma Putra, 2003, *Guratan Budaya Dalam Perspektif Multi Kultural*, Denpasar: Kerja sama Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya, Linguistik, dan Jurusan Athropologi, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana, dan CV Bali Media.
- Atmadja, Nengah Bawa. 2005. “*Bali Pada Era Globalisasi: Pulau Seribu Pura Tidak Seindah Penampilannya*”, Singaraja: Hasil Penelitian belum diterbitkan.

- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bosch, FDK. 1983. *Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia*, Jakarta: Bhratara.
- Fukuyama, Francis. 2002. *The end of History And The Last Man*. Yogyakarta: Qalam
- Geria, I Wayan. 2000. *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*, Denpasar: Percetakan Bali.
- Goris, R. 1974. *Sekta Sekta di Bali*. Jakarta: Bhratara.
- Gunadha, Ida bagus. 2003. *Refleksi Nilai-Nilai Susila Hindu Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Sains dan Teknologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Etika hindu, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- Mardawa, I. M. D., Sudarsana, I. K., & Mahardika, I. G. N. A. W. (2018). Penggunaan Banten Daun Di Pura Dadia Alangkajeng Di Kelurahan Lelateng Kabupaten Jembrana (Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu). *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 2(1), 47-51.
- Saputra, I. K. P., Sudarsana, I. K., & Mahardika, I. G. N. A. W. (2018). Tradisi Nunas Kecap Mandi Di Pura Dalem Gede Desa Pakraman Galiran Di Kabupaten Bangli (Perspektif Pendidikan Agama Hindu). *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 2(1), 13-18.
- Soares, F., & Sudarsana, I. K. (2018). Religious Harmony Among Senior High School Students Multicultural Education Case Study in the Cova-Lima District of East Timor. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 2(1), 154-162.
- Sudarsana, I. K. (2018). Ngaben Warga Dadya Arya Kubontubuh Tirtha Sari Desa Ulakan Karangasem: Perspektif Pendidikan Agama Hindu. *Jayapangus Press Books*.